ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN CILACAP PERIODE 2011-2015

(Studi Kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap)

SKRIPSI



Oleh:

Nama	:	Widyaswari Kusuma Ningrum
Nomor Mahasiswa	:	14313295
Program Studi	:	Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN CILACAP PERIODE 2011-2015
(Studi Kasus di 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap)

Widyaswari Kusuma Ningrum
14313295@students.uii.ac.id

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer (Dana Desa), Jumlah Penduduk terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap yang terdiri dari 24 Kecamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang diperoleh melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) serta Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki data dari 24 Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model* dengan waktu penelitian tahun 2011-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga variabel yang diuji, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Daerah. Dana Transfer (Dana Desa) dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Daerah.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer (Dana Desa), Jumlah Penduduk, Regresi Data Panel

ABSTRACT

This study aims to increase the Local Revenue, Village Funds, Population to the Alocation of Regional Expenditure in Cilacap Regency consisting of 24 Districts. The data used in this study is sourced from the local Goverment of Cilacap Regency obtained through the Agency for Assessment of Financial Management and Regional Assets (BPPKAD) and the Central Bureuau of Statistics (BPS) which has data from 24 Districts in Cilacap Regency. The method used in this research is panel data regression method by using Fixed Effect Model method with researching the year from 2011-2015. The results of this study indicate that of the three variables tested, Local Revenue is significantly negative to the Regional Expenditure Allocation. Fund Transfers (Village Funds) and Population significantly positive to Local Expenditure Allocation.

Keywords: Regional Expenditure, Local Original Income, Funds Transfer (Village Funds), Total Population, Panel Data Rregression

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan otonomi daerah secara efektif mulai 1 Januari 2001 hingga saat ini, yang merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan permerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintahan Kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintahan pusat.

Otonomi Daerah diberlakukan agar Pemerintah dapat mandiri, dan tidak tergantung dengan Pemerintah Pusat dalam segala hal, khususnya dalam hal pembiayaan maupun pengelolaan keuangan. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional Daerah, yang oleh Pemerintah Daerah dilaporkan diperhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri.

Menurut Halim (2010) desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Penndapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah.

Pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dibidang keuangan dan pengelolaan anggaran di sisi penerimaan dan pengeluaran. Setiap daerah diwajibkan untuk membuat suatu rencana atau rancangan keuangan daerah yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah Daerah yang sebelumnya telah dibahas dan disetujui oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU no 32 tahun 2004). Tujuan perancangan APBD adalah agar pemerintah Daerah dapat memperkirakan berapa jumlah besaran pedapatan yang akan diterima dan besaran pengeluaran yang akan dibelanjakan.

Menurut Warsito (2008) belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang

tertentu yang dapat dilaksankan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan pengembangan sistem jaminan sosial.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk Daerah melalui bagi hasil berdasarkan Daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar Daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum yaitu terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing Daerah (Undang-Undang no 33 Tahun 2004).

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Putra Kurnia (2016) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja daerah antar kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk, dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah, sedangkan variabel dana alokasi umum berpengaruh positif tidak signifikan terdapat alokasi belanja daerah di kabupaten/kota di

Provinsi D.I Yogyakarta karena pemerintah daerah masih bergantung pada pendapatan asli daerah sebagai sumber dana daerah dalam hal alokasi belanja daerah. Perbedaan dengan penelitian kali ini adalah terdapat perbedaan pada variabel dan daerah penelitiannya dan daerah penelitiannya, sedangkan persaannya sama-sama meneliti tentang pengaruh belanja di pemerintahan daerah.

Devita Andri (2014) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di provinsi Jambi. Ketika diamati dari pengaruhnya dengan menggunakan model fixed effect, dapat dilihat bahwa PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung. Hal ini berbeda dengan belanja tidak langsung yang memiliki efek positif karena pertubuhan penduduk di kabupaten/kota di jambi dapat meningkatkan alokasi belanja pegawai, sedangkan untuk belanja langsung terutama untuk belanja modal tidak efisien. Perbedaan penelitian kali ini adalah terdapat perbedaan pada daerah penelitiannya, sedangkan persamaannya yaitu sama dalam variabel dan meneliti tentang pengaruh belanja di pemerintahan daerah.

Alokasi Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002).

Proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda.

Menurut penelitian Pambudi (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu belanja selain modal (belanja administrasi umum, belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, belanja transfer, belanja tak terduga) dan belanja modal. Secara umum belanja dalam APBD dikelompokan menjadi lima kelompok, yaitu:

a. Belanja administrasi umum

   Merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja pemeliharaan, merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubugan secara langsung dengan pelayanan publik.

b. Belanja Operasi

   Merupakan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik.

c. Belanja Modal

   Merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

d. Belanja Transfer

Merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut.

Pendapatan Asli Daerah

Darise (2009) mengemukakan, Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari PAD. Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah.

Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari PendapatanAsli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari danaperimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi,2007).

Dana Transfer (Dana Desa)

Dana Transfer (Dana Desa) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan berasal dari APBN. Tujuan diberikannya dana ini adalah untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan daerah, kebutuhan akan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan juga potensi daerah (UU No 33 Tahun 2004). Adapun kebutuhan daerah ini dicerminkan dengan faktor luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesjahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan untuk kapasitas fiskal dicerminkan dengan faktor dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber DayaAlam. Alokasi DAU bagi daerah yang

potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.Proporsi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal penentuan proporsi belum dapat dihitung secarakuantitatif, proporsi DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Provinsi dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. (Bambang Prakosa, 2004). Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan dampak adanya batas, bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial, mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfer menyerap berbagai pengaruh dari kreativitas manusia.

Teknologi dan organisasi dapat dikelola dan ditingkatkan guna memberi jalan bagi era baru pembangunan ekonomi. Dengan demikian strategi pembangunan berkelanjutan bermaksud mengembangkan keselarasan baik antara umat manusia dengan alam. Keselarasan tersebut tentunya tidak bersifat tetap, melainkan merupakan suatu proses yangdinamis. Proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan diselenggarakan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Oleh karena itulah dalam pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi penduduk serta sumber daya alam dan lingkungan yang ada di suatu wilayah tertentu.

Perhatian pemerintah terhadap kependudukan dimulai sejak pemerintah OrdeBaru memegang kendali. Konsep pembangunan manusia seutuhnya yang tidak lain adalah konsep pembangunan kependudukan mulai diterapkan dalam perencanaan pembangunan Indonesia yang sistematis dan terarah sejak Repelita 1 pada tahun 1986. Namun sedemikian jauh, walaupun dalam tatanan kebijaksanaan

telah secara sungguh-sungguh mengembangkan konsep pembangunan yang berwawasan kependudukan, pemerintah nampaknya belum dapat secara optimal mengimplementasikan dan mengintegrasikan kebijaksanaan tersebut. Jargon pembangunan berwawasan kependudukan sudah lama didengar dalam bentuk dan format lain, namun masih mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Sudah lama didengung-dengungkan mengenai penduduk sebagai subyek dan obyek pembangunan, jargon mengenai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, atau pembangunan bagi segenap rakyat. Sudah saatnya jargon tersebut diimplementasikan dengan sungguh-sungguh jika tidak ingin mengalami krisis ekonomi yang lebih hebat lagi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, seluruh Kecamatan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah menjadi populasi yang digunakan guna menunjang penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) serta Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Cilacap.

Penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap Periode 2011-2015, data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* menjadi metode pengolahan data yang digunakan. Data tahunan selama tahun 2011 hingga 2015 digunakan sebagai data *time series* dalam penelitian ini. Sementara 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap menjadi data *cross section* dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model pengolahan data yang digunakan pada sebuah penelitian perlu didasari dari berbagai macam pertimbangan statistik.

1. *Chow Test (*Uji F-statistik)

Dalam pengujian ini terhadap pemilihan model, dimana akan digunakan model estimasi antara *common effect* atau *fixed effect* dengan pengujian terhadap hipotesis:

Ho: Memilih menggunakan model estimasi *common effect*

Ha: Memilih menggunakan model *fixed effect*

Dalam pengujian ini dapat melakukan pengelihatan terhadap *cross section f dan cross section chi-square.* Ketika *cross section f* lebih besar dari *cross section chi-square*, maka menerima Ho atau sebaliknya maka menerima Ha.

Dari hasil tabel 4.4 didapatkan nilai *cross section f* sebesar 3.466680 dan *cross section chi-square* nya sebesar 74.298152. sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang layak digunakan adalah *fixed effect models.*

Tabel 4.4
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.466680	(23,93)	0.0000
Cross-section Chi-square	74.298152	23	0.0000

Sumber: data sekunder, diolah menggunakan Eviews 8

2. Uji Hausman

Dalam pengujian ini terhadap pemilihan model, dimana akan digunakan model estimasi antara *random effect* atau *fixed effect* dengan pengujian terhadap hipotesis:

Ho: Memilih menggunakan model estimasi *random effect*

Ha: Memilih menggunakan model *fixed effect*

Dalam pengujian ini dapat melakukan pengelihatan terhadap *cross section random dan cross section chi-square.* Ketika *cross section random* lebih besar dari *cross section chi-square*, maka menerima Ho atau sebaliknya maka menerima Ha.

Dari hasil tabel 4.5 didapatkan nilai *cross section random* sebesar 13.135987 dan *cross section chi-square* nya sebesar 74.298152. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang layak digunakan adalah *fixed effect models*.

Tabel 4.5
Uji Hausman

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section random	13.135987	3	0.0044

Sumber: data sekunder, diolah menggunakan Eviews 8

Evaluasi Regresi

Tabel 4.6
Hasil Estimasi *Fixed Efffect Models*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Fixed Effects (Cross)					
C	-12210201	4107617	-2.972576	0.0038	_CS--C	3949008.	_MAOS--C	5071865.	_PTM--C	4474708.
X1?	-1.040669	0.613714	-1.695691	0.0933	_CT--C	-4128332.	_SPG--C	-5171522.	_CPR--C	6035268.
X2?	0.357162	0.052619	6.787703	0.0000	_CU--C	-9484801.	_KRY--C	933004.5	_KRP--C	-5262495.
X3?	173.2260	56.97643	3.040310	0.0031	_JL--C	-4339389.	_BNG--C	-1256636.	_CMG--C	792032.2
R-squared	0.598647				_KWT--C	-90863.17	_NSW--C	1E+07	_MJG--C	-928696.0
F-statistic	5.767.414				_BTS--C	1782596.	_SDJ--C	1645973.	_WNJ--C	-733656.9
Prob (F-statistic)	0.000000				_KSG--C	2960010.	_KDJ--C	-3780042.	_DYL--C	-1952359.
					_ADP--C	-1E+06	_GDM--C	-8793315	_KPL--C	1198166.

Sumber: data sekunder, diolah menggunakan Eviews 8

Uji Kebaikan Garis Regresi (R-squared)

Pengujian R^2 atau disebut koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Rentang nilai dari R^2 yaitu antara nol sampai dengan satu.

Semakin tinggi R^2 nya, maka semakin baik garis regresinya karena dapat menjelaskan nilai data aktualnya. Sebaliknya, semakin rendah nilai R^2 nya atau mendekati nol maka garis regresinya semakin buruk (Sriyana, 2014).

Seperti yang tertera pada tabel 4.6, didapatkan angka koefisien determinasi (R2) 0.783911 atau 78.39%. Artinya sebesar 78.39% variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa, Jumlah Penduduk) disetiap Kecamatan mempengaruhi variabel dependen (Belanja Daerah) di Kabupaten Cilacap. Sedangkan sisanya sebesar 21.61% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara menyeluruh (bersama-sama). Apabila probalbilitas F-statistic lebih besar dari α maka H_0 diterima atau secara bersama-sama semua variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan apabila probabilitas F-statistic lebih kecil dari α maka H_a diterima atau secara bersama-sama seua variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Hipotesis:

Ho: variabel independen tidak berpengaruh signifikan

Ha: variabel independen berpengaruh signifikan

Dari hasil estimasi:

Probabilitas (F-statistic) = 0.000000

$\alpha = 10\% = 0.1$

Probabilitas < α (0.000000 < 0.1) maka model signifikan. Artinya menerima Ha atau dapat dikatakan secara bersama-sama variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa, Jumlah Penduduk) disetiap kecamatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Daerah) di Kabupaten Cilacap.

Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t)

Uji Signifikansi (Uji T) merupakan pengujian yang dilakukan pada masing-masing variabel independen dengan tujuan untuk mengetahui apakah secara individu variabel-variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F-statistic dengan α.

Ketika probabilitas F-statistic lebih besar dari α, maka H_0 diterima dan menolak H_a. Artinya, variabel independen tersebut secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, ketika probabilitas F-statistic lebih kecil dari α, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel independen tersebut secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_0: variabel independen tidak berpengaruh signifikan

H_a: variabel independen berpengaruh signifikan

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan diatas, dapat diketahui bahwa nilai masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Variabel X_1 (Pendapatan Asli Daerah)

Probabilitas = 0.0933

$\alpha = 10\% = 0.1$

Probabilitas < α (0.0933 < 0.1) atau dapat dikatakan menolak H_o dan menerima H_a. Berarti variabel X_1 berpengaruh signifikan. Artinya variabel X_1 Pendapatan Asli Daerah di 24 Kecamatan Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) berpengaruh terhadap variabel Y (Belanja Daerah) di Kabupaten Cilacap.

Variabel X2 (Dana Desa)

Probabilitas = 0.0000

$\alpha = 10\% = 0.1$

Probabilitas < α (0.0000 < 0.1) maka variabel X_2 berpengaruh signifikan. Artinya variabel X_2 Dana Desa di 24 Kecamatan Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) berpengaruh terhadap variabel Y (Belanja Daerah) di Kabupaten Cilacap.

Variabel X3 (Jumlah Penduduk)

$\alpha = 10\% = 0.1$

Probabilitas < α (0.0031 < 0.1) maka variabel X_3 berpengaruh signifikan. Artinya variabel X_3 Jumlah Penduduk di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) berpengaruh terhadap variabel Y (Belanja Daerah) di Kabupaten Cilacap.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh PAD adalah -1.040669, t-hitungnya adalah -1.695691 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.0933 kurang dari 10% (P<α) sehingga secara statistik variabel PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Daerah (Menerima Ha).

Hasil tersebut bertentangan dengan dugaan hipotesis dan penelitian yang dilakukan oleh Amrozi (2013) menyebutkan bahwa PAD berpengaruh sinifikan positif terhadap Belanja Daerah. Sedangkan dalam penelitian ini menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Daerah, PAD merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap daerah yang berasal dari sumber ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut, kemudian PAD dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Dengan demikian, dalam penelitian ini menyatakan bahwa kenaikan PAD sebagai penerimaan pemerintah daerah di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala,

Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) akan berdampak pada menurunnya alokasi belanja daerah di Kabupaten Cilacap, sehingga PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Daerah. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah daerah yang cenderung mengandalkan PAD memilih untuk menekan atau menghemat belanja daerahnya sebab sumber pembiayaannya ditekankan kepada PAD yang terbatas. Jika pemerintah ingin meningkatkan Belanja Daerahnya, maka pajak serta retribusi daerah sebagai sumber PAD juga harus ditingkatkan.

Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh Dana Desa adalah 0.357162, t-hitungnya adalah 6.787703 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.0000 kurang dari 10% ($P<\alpha$) sehingga secara statistik variabel Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah (Menerima Ha).

Hasil tersebut sama dengan dugaan hipotesis dan penelitian yang dilakukan oleh Purpitasari (2015), menyebutkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian ini Dana Desa juga berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, hal tersebut dibuktikan dengan adanya rata-rata data empiris Dana Desa seluruh Kecamatan di Kabupaten Cilacap yang mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dengan demikian, dalam penelitian ini menyatakan bahwa kenaikan Dana Desa sebagai penerimaan pemerintah daerah di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) akan berdampak pada kenaikan alokasi belanja daerah di Kabupaten Cilacap, sehingga Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah.

Dana Desa ini merupakan indikator dari tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Desa yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan masih bergantung pada pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan, dan begitu juga sebaliknya. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Halim, Abdul 2003). Hal ini disebabkan karena adanya transfer Dana Desa dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Daerah, sehingga diharapkan pembangunan di daerah tersebut dapat ditingkatkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh Jumlah Penduduk adalah 173.2260, t-hitungnya 3.040310 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah

0.0031 kurang dari 10% (P<α) sehingga secara statistik variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah (Menerima Ha).

Hasil tersebut sama dengan dugaan hipotesis dan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016), menyebutkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian ini Jumlah Penduduk juga berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, ini dibuktikan dengan rata-rata data empiris Jumlah Penduduk seluruh Kecamatan di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015.

Dengan demikian, dalam penelitian ini menyatakan bahwa kenaikan Jumlah Penduduk di 24 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kawunganten, Bantarsari, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan, Cipari, Karang Pucung, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Dayeuh Luhur, dan Kampung Laut) akan berdampak pada kenaikan alokasi belanja daerah di Kabupaten Cilacap, sehingga Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi.

Penduduk berperan penting dalam peningkatan belanja daerah. Semakin banyak penduduk yang menetap di suatu daerah, maka semakin besar pula belanja daerah yang dihasilkan, begitu juga sebaliknya. Ini dikarenakan pada jumlah

penduduk yang bekerja. Dari hasil diatas, terlihat bahwa pemerintah daerah tidak lagi bergantung secara keuangan terhadap transfer dana dari pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah yaitu untuk meningkatkan belanja langsungnya. Sehingga dapat disimpulkan, pertambahan jumlah penduduk dapat meningkatkan pengeluaran belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

- Pendapatan Asli Daerah di stiap Kecamatan berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Alokasi Belanja Daerah menurun, atau dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli daerah akan menurunkan Alokasi Belanja Daerah.
- Dana Transfer (Dana Desa) di tiap kecamatan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa ketika Dana Transfer (Dana Desa) di setiap Kecamatan di Kabupaten Cilacap meningkat, maka Alokasi Belanja Daerah di tiap Kecamatan juga akan meningkat.
- Jumlah Penduduk di setiap Kecamatan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Daerah ke Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada bertambahnya jumlah Alokasi Belanja Daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Jumlah Penduduk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan anggaran belanja

daerah untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik.

Implikasi:

- Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang ada agar dapat menambah PAD utuk menunjang pemerataan dan pembangunan ekonomi di setiap Kecamatan di Kabupaten Cilacap.
- Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengelola dengan baik Dana Desa yang diberikan ke Kecamatan, sebab Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama dalam pembiayaan Alokasi Belanja Daerah tiap Kecamatan. Namun tidak semua rancangan pengeluaran penting, sehingga diharapkan pemerintah daerah mempertimbangkan terlebih dahulu belanja yang hendak dilakukan agar pengeluaran yang dilakukan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Amrozi, A.I dkk. 2013. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokas Belanja Pemerintah Daerah". Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No.9, STIESIA Surabaya.

Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Cilacap. www.bps.go.id diakses tanggal 22 Sepember 2017.

Badan Pusat Statistik. Pendapatan Asli Daerah. www.bps.go.id diakses tanggal 22 September 2017.

Baltagi, B. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data,* 3rd Edition, John Wiley & Sons.

BPPKAD. 2016. Dokumen Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap (*Audited*). 2011-2015.

Devita, A dkk. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Povinsi Jambi". Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.2 No.2, Universitas Jambi.

Ghozali, Imam, Arifin S. 1997. Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4. Penerbit BPFE: Yogyakarta.

Halim, Abdul dan Mujib, Ibnu. (2009), *Proble Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah),* Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Kurnia, P. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja

Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2007-2015".*Karya Ilmiah.*

Madiasmo, 2004. "Optimalisasi Belanja Modal". Jakarta: Erlangga.

Purpitasari, P dkk. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah". Jurnal Imlu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 11, STIESIA Surabaya.

Sriyana, J. 2014. Metode Regresi Data Panel (Dilengkapi Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia). Ekonisia, Yogyakarta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung, ALFABETA.

UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif).

Undang-Undang NO. 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah.